

Berita Tentang Covid-19 Harus Positif

BANYUMAS (KR) - Media massa diminta untuk memberitakan hal-hal positif terkait dengan vaksinasi Covid-19 sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Permintaan itu disampaikan Bupati Banyumas Achmad Husein Kamis (14/1) saat ‘Coffee Morning’ bersama wartawan di pelataran parkir timur Pendapa Sipanji, Purwokerto, Kabupaten Banyumas."Pemerintah sudah menjamin bahwa vaksinasi itu aman ditambah dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan vaksin Covid-19 yang ada di Indonesia adalah halal dan suci," kata Achmad Husein.

Menurut Achmad Husein segala sesuatu yang terkait Covid-19 pemberitaannya sebiusa mungkin mendukung vaksinasi, langkah itu sangat diperlukan karena menyangkut kebersamaan dan keselamatan seluruh masyarakat. "Ini menyangkut kebersamaan kita, menyangkut juga keselamatan wartawan-wartawati semuanya, kita semuanya, sehingga kita harapkan vaksinasi Covid-19 sukses," ungkapnya. Bupati mengatakan sukses itu ditandai dengan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi dengan persentase yang besar. (Dri)

Kemitraan Media Massa Ditingkatkan

SALATIGA (KR) - Ketua DPRD Salatiga Dance Ishak Palit, mengatakan lembaga DPRD melalui kehumasan diminta semakin meningkatkan kerja sama yang baik dengan wartawan dan media massa dalam membangun Salatiga ke depan agar lebih baik. Hal tersebut diungkapkan Dance Ishak Palit saat menghadiri silaturahmi beberapa wartawan dengan pejabat baru kehumasan DPRD Salatiga, Rabu (13/1). "Hubungan lembaga DPRD Salatiga dan media massa selama ini cukup baik dan ke depan harus lebih baik lagi. Termasuk bagaimana menjalin kemitraan kerja sama dengan media dalam rangka membangun kebersamaan dan membangun Salatiga lebih baik ke depan," tandas Dance Ishak Palit.

Sekwan DPRD Salatiga Sri Wityowati mengatakan pertemuan dengan beberapa wartawan di Salatiga ini karena di DPRD Salatiga ada Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru yang mana saat ini ada bagian baru yakni Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. Sedangkan kehumasan digabungkan dengan Bagian Persidangan. "Ada SOTK Baru sehingga perlu diketahui teman-teman wartawan. Setelah ini nanti akan ada pertemuan menindaklanjuti program yang bisa dikerjakan samakan dengan media massa," jelas Sri Wityowati. Perwakilan Wartawan Salatiga yang hadir, Surya Yuli Sulatio mengungkapkan agar kehumasan di DPRD Salatiga aktif memberikan informasi dan agenda kepada wartawan agar bisa diangkat beritanya. "Kami berharap humas di DPRD Salatiga selalu aktif mengirimkan informasi dan agenda biar kami yang akan memilih mana yang layak," katanya. (Sus)

Pemkab Banyumas Lakukan Skrining

BANYUMAS (KR) - Untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 dengan sasaran warga yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid, serta lanjut usia Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banyumas akan melakukan skrining di 80 desa pada tanggal 18 Januari 2021. "Nantinya dalam pelaksanaan satu Puskesmas kami jatah dua desa, jadi ada 80 desa. Akan kami pilih desa yang kematiannya lebih banyak dari desa yang lain dan kasus aktifnya lebih banyak dari desa yang lain," kata Kepala Dinkes Kabupaten Banyumas Sadiyanto, Jumat (15/1). Menurutnya skrining akan dilakukan dengan menggunakan tes cepat (rapid test) anti-gen. Langkah itu dilakukan dengan maksud melihat para komorbid, para usia lanjut, apakah positif atau negatif, apakah baik kondisinya.

"Kalau positif akan segera kita tindaklanjuti dengan PCR dan kalau (hasilnya) positif, ya tentu kondisi sehat ataupun ada gejala, akan dibawa ke rumah sakit untuk jaga-jaga agar tidak sampai fatal, agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan," katanya. Dalam tes rapid antigen ini Dinkes menargetkan menysasar 4.000 orang karena Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mendapatkan bantuan sebanyak 5.000 alat tes cepat antigen dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selanjutnya sisa alat tes cepat bantuan BNPB tersebut akan dijadikan stok Dinkes Banyumas untuk keperluan kegiatan lain. (Dri)

Warga Kiyangkongrejo Terima Bantuan Masker

PURWOREJO (KR) - Masyarakat Desa Kiyangkongrejo Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo mendapat bantuan seribu masker, Kamis (14/1). Dandim 0708 Purworejo Letkol Inf Lukman Hakim menyerahkan bantuan dari Yayasan Bhakti Sosial Ikhlas Tambora Jakarta kepada pemerintah desa setempat. Bantuan langsung didistribusikan kepada warga setempat. "Kami mendapat bantuan dari lembaga sosial di Jakarta, kebetulan tokoh pemuda kami Mas Yanuar, aktif di organisasi itu," ujar Kades Kiyangkongrejo Akhmad Asngudi, Kepala KR, usai penyerahan bantuan. Menurutnya, lembaga peduli setelah mengetahui adanya warga Kiyangkongrejo yang terkonfirmasi Covid-19. Lima warga terkonfirmasi, sedangkan satu dinyatakan probabel. Satu warga terkonfirmasi Covid-19 dan satu probabel meninggal dunia. Sementara empat warga terkonfirmasi lainnya menjalani isolasi mandiri. "Empat warga terkonfirmasi dan keluarganya menjalani isolasi mandiri di rumah. Kami dengan program Jogo Tonggo membantu mencukupi kebutuhan mereka," ucapnya. (Jas)



KR-Jarot Sarwosambodo

Penyerahan bantuan masker untuk warga Desa Kiyangkongrejo.

Anggota Berprestasi Terima Penghargaan

KLATEN (KR) - Polres Klaten memberikan penghargaan kepada 30 anggota dari berbagai satuan dan POisek jajaran yang berprestasi, Rabu (13/1). Kapres Klaten AKBP Edy Suranta Sitepu mengemukakan, pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada personel Polres Klaten yang berdedikasi dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya. "Jadi kan momentum ini sebagai contoh yang baik untuk meningkatkan kerja," tegas Kapres.

Kapolres berpesan agar para penerima penghargaan tetap mempertahankan prestasi dan kinerjanya. Apalagi ke depan, tugas Polri akan semakin berat dengan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada kamtibmas. "Jangan

merasa puas dalam mencapai sesuatu, karena dinamika perkembangan situasi akan selalu berubah dan menuntut peningkatan kualitas," Pesan Kapolres.

Kapolres juga menekankan agar sinergi Polres Klaten dengan masyarakat terus ditingkatkan. Hal ini sangat penting karena peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan Polri dalam pelaksanaan tugasnya untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif aman dan nyaman. Salah satu item penghargaan yaitu ungkap kasus curat pecah kaca. Adalah salah satu contoh bagaimana dukungan masyarakat menjadi salah satu penentu keberhasilan tugas Polri ini. Satu lagi yang disinggung Kapolres Klaten adalah masalah Covid-19.

Personel yang menerima penghargaan antara lain AKP Edi Sukanto SH MH (Kasat Sabhara). Berhasil meraih juara 1 lomba kesabharaan tingkat Polda, Ipda Ngurah Pandu Prabawa STRK (Kanit Regident Sat Lantas/mantan Kanit Pidum Sat Reskrim) beserta 18 anggota sat Reskrim.

Berhasil mengungkap kasus curat pecah kaca 9 TKP di wilayah Klaten, dan Bripta Joko Santoso (Bhabinkamtibmas Desa Nglinggi, Klaten Selatan) berhasil membawa desa binaannya menjadi juara 2 kampung Siaga tingkat Polda Jateng.

Bhabinkamtibmas terbaik dalam hal pelaporan giat pada aplikasi 'Jogo Wargo Jogo Negro' yakni Bripta Lestario (Bhabinkamtibmas Desa Duwet, Wonosari).

Dedikasi tinggi sebagai Bhabinkamtibmas untuk Aipda Dinas Setiyawan SH (Bhabinkamtibmas Desa Pundungan, Juwiring). Penghargaan kategori loyal dan disiplin dalam pelaksanaan tugas, untuk Iptu Suprpta SH (Kanit Reskrim Polsek Wonosari),

Aiptu Herman Susilo SH (Ps Kanit 2 Sat Intelkam), Aiptu Agus Riyanto (Ps Ka SPKT Polsek Trucuk), Aiptu Matzuri (Ps Kanit Intelkam Polsek Trucuk), Bripta Subarno (Sat Intelkam), Bripta Muh Ali (Sat Intelkam) dan Briptu Yoga Agus M (Sat Intelkam). (Sit)



KR-Sri Warsiti

Kapolres Klaten menyerahkan penghargaan kepada anggota berprestasi.

TAK SABAR TUNGGU VERIFIKASI

Nelayan Cantrang Nekat Melaut

REMBANG (KR) - Para pemilik kapal dan nelayan cantrang merasa terombang- ambing kebijakan pemerintah pusat. Menurut informasi, khusus nelayan cantrang harus melalui verifikasi yang dilakukan oleh tim yang khusus melibatkan staf dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pusat, bila akan beroperasi.

Namun karena belum jelas akhirnya ratusan kapal ikan dari perairan Rembang nekat melaut. Data yang dihimpun KR, Kamis (14/1) dari Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rembang menyebutkan di wilayah Rembang terdapat 300 kapal cantrang.

Jika masing-masing kapal ikan menampung 20 ABK anak buah kapal (ABK) maka terdapat sekitar 6.000 nelayan cantrang yang terkena dampak.

Ketika Era menteri KKP Susi Pudjiastuti dengan tegas melarang beroperasinya kapal cantrang yang dianggap merusak lingkungan laut.

Namun seiring perjalanan waktu, kapal cantrang diperbolehkan beroperasi dengan persyaratan ketat.

Ketua Asosiasi Kapal Cantrang

Rembang Suyoto saat dihubungi tetap meminta kebijakan agar nelayan cantrang diperbolehkan melaut (mencari ikan, Red).

"Meski harus verifikasi kami tetap memperjuangkan agar kapal cantrang boleh beroperasi. Karena ini menyangkut hajat hidup nelayan," kata Suyoto, Kamis kemarin.

Mereka lanjut Suyoto, adalah memang dilahirkan dan hidup sebagai nelayan. Sehingga kalau dilarang melaut, menurutnya tidak akan bisa hidup dan tidak bisa menghidupi keluarganya.

Para nelayan disebutkan taat aturan pemerintah, karena itu sudah cukup sabar menunggu verifikasi.

Terpisah Kepala Kantor Pela-

buhan Perikanan Pantai (KPPP) Tasikagung Rembang, Jafar Lom-ban G meminta agar nelayan cantrang menunggu tim verifikasi dari kementerian KKP yang saat ini masih berada di Tegal.

"Persyaratan untuk nelayan cantrang harus mendapatkan lisensi dari tim verifikasi langsung dari Kementerian KKP," kata Jafar.

Namun,dengan alasan kebutuhan perut, puluhan kapal cantrang hasil pengamatan KR selama beberapa hari ini sudah melakukan aktivitas mencari ikan.

Tapu tampaknya mereka sudah tidak sabar lagi bila harus menunggu tanpa kepastian, kedatangan tim verifikasi yang dianggap lamban. (Ags)

KPK Monitoring UPG di Pemkab Boyolali

BOYOLALI (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali, beberapa waktu yang lalu meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (PKPK) Republik Indonesia sebagai Pemerintah Daerah (Pemda) dengan kriteria Pengelola Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) terbaik se-Indonesia. Menindaklanjuti hal tersebut, KPK melakukan monitoring implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) di

lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali terkait dengan Pengembangan Mekanisme Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi.

Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI Syarif Hidayat menjelaskan bahwa monitoring tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi dokumen yang telah diserahkan kepada KPK dengan fakta di lapangan. "Ingin mengklarifikasi dan Alhamdulillah dari klarifikasi yang

sudah kita lakukan antara dokumen dengan apa yang ada di lapangan, Insha Allah sesuai. Jadi wajar kalau Boyolali diberikan predikat sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi terbaik," ujarnya saat ditemui di aula Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali, Kamis (14/1).

Beberapa praktik UPG yang baik yang ada di Kabupaten Boyolali, akan dipelajari yang selanjutnya diharapkan akan dit contoh oleh KPK maupun kabupaten/kota lainnya.

Sebagai contoh yakni terkait dengan fee perbankan yang tidak diperbolehkan di Kota Susu. Ternyata teman-teman di Boyolali sejak pertengahan 2019 sudah mulai menyatakan bahwa fee perbankan itu tidak diperbolehkan. Bendahara yang mengelola keuangan di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak boleh menerima gratifikasi, menerima fee perbankan. (*-1)



KR-Mulyawan

Rombongan KPK saat melakukan kunjungan ke Pemkab Boyolali.

DISTRIBUSI DANA BST DI KOTA MAGELANG

Penerima Harus Hadir Sesuai Jam Undangan

MAGELANG (KR) - Manakala ada yang datang tidak pada jadwalnya, sebaiknya pulang saja. Hal itu ditegaskan dalam proses pencairan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial RI Tahun 2021 di wilayah Kota Magelang.

Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Sosial Kota Magelang Dra Wulandari Wahyuningsih di sela-sela penantauan pelaksanaan penyaluran dana BST dari Kemensos RI Tahun 2021 di Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, Jumat (15/1).

Didampingi Kepala Kantor Pos Magelang Dias Woro N, Wulandari menambahkan protokol kesehatan ketat memang diberlakukan dalam proses penye-

rahan dana BST di Kota Magelang ini. Tahun 2021 di wilayah Kota Magelang ada 7.342 KPM yang menerima BST. Penyerahan dilakukan selama 4 bulan, mulai Bulan Januari hingga Bulan April 2021, setiap bulan diserahkan Rp 300.000 bagi setiap KPM.

Penyerahan di kelurahan-kelurahan dilaksanakan secara bergantian sejak Rabu (13/1) dan terakhir Jumat (15/1). Yaitu di Kelurahan Cacaban sebanyak 238 KPM, Rejowinangun Selatan 543 KPM, Kemiri-rejo 264 KPM, Kelurahan Magelang 302 KPM, Kelurahan Panjang 550 KPM, Kedungsari 461 KPM dan Rejowinangun Utara 324 KPM.

Untuk Rejowinangun Utara dilaksanakan 3 hari, yaitu Rabu (13/1), Kamis

(14/1) lalu dan Jumat kemarin. Untuk Rabu jumlah penerimanya 450 KPM, Kamis lalu jumlah penerimanya 450 KPM.

Selama pelaksanaan PP-KM wajib dilaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Untuk antrian masyarakat, tidak diperbolehkan berdiri. Mereka harus duduk di kursi yang sudah disediakan dan diatur berjajar.

Kedatangan para penerima juga dijadwal setiap jamnya. Bila ada warga yang datangnya tidak sesuai dengan jadwal, diminta untuk pulang menunggu jadwalnya. Kecuali bagi warga yang memang memiliki keperluan yang tidak dapat ditinggalkan.

Sekretaris Daerah Kota Magelang Drs Joko Budiyono MM secara terpisah

mengatakan distribusi atau penyerahan BST kepada KPM sudah diatur agar pembagiannya sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Semua dijadwal waktunya, diatur jaraknya, wajib memakai masker dan mencuci tangan.

Pembagian BST dibuat shift per jam dengan jum-

lah penerima disesuaikan dan setiap shift diberi jeda waktu. Oleh karena itu, penerima wajib hadir sesuai jam undangan yang telah ditentukan. Sedangkan bagi penerima yang terkonfirmasi positif Covid-19, maka BST akan diantar ke rumah oleh Lurah atau petugas masing-masing. (Tha)



KR-Thoha

Salah satu warga menunjukkan uang yang baru saja diterimanya.